



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Menko PMK Ajak Umat Jadikan Nilai-Nilai Agama
Sebagai Pendorong Kemajuan dan Kesejahteraan Bangsa**

Siaran Pers Nomor : 18/HumasPMK/II/2017

Manado (12/02)--- Dialog Kebangsaan memiliki arti penting dan strategis mengingat belakangan ini, bangsa Indonesia tengah mengalami ujian yang dapat mengganggu rasa, semangat dan jiwa persaudaraan kebangsaan Indonesia. Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai momentum sekaligus forum yang bermanfaat untuk berdialog, bertukar pikiran, dan mencari solusi bagi upaya membangun kehidupan dan kerukunan umat beragama yang lebih baik. Demikian apresiasi Menko PMK mengawali arahnya dalam forum Dialog Kebangsaan yang digagas oleh Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Sulawesi Utara di Gedung Graha Gubernur Bumi Beringin, Komplek Rumah Dinas Gubernur, siang ini. Arahan Menko PMK kali ini mengambil thema “Posisi Agama dalam Pembangunan Manusia dan Kebudayaan” dan dihadiri oleh Gubernur Sulut, Olly Dondokambey; Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw; Ketua PBNU yang diwakili oleh Sekjend PBNU, KH Masduki Baidlowi; Ketua PWNU Sulut, Sya’ban Mauludin; Ketua MUI Sulut; Anggota DPR RI asal Sulut, Vinda Sarundajang; para Anggota DPRD Sulut; Ketua Sinode GMIM yang diwakili oleh Pdt. Toni Kaunang; Kapolda Sulut, Pejabat Forkominda Sulut, para pimpinan lembaga agama dan tokoh agama di Provinsi Sulut; serta undangan lainnya.

Menko PMK dalam arahnya juga mengungkapkan, terdapat tiga ruang lingkup sesuai tugas dan fungsinya sebagai Pimpinan di Kemenko PMK yaitu menjamin kualitas hidup manusia, meningkatkan kapabilitas Manusia Indonesia, dan memperkuat karakter Bangsa Indonesia. Landasan dan arah yang jelas tentu sangat diperlukan dalam menjalani tiga ruang lingkup tadi dengan bertumpu pada nilai tatanan dasar dan tatanan sosial, ekonomi, dan politik atau sesuai ideologi bangsa dan negara. Sementara dalam UU No.17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, disebutkan bahwa pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Pembangunan agama dalam bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terwujud dalam sejumlah program dan kegiatan antara lain pelayanan urusan di Bidang Agama yang menjamin pemenuhan hak setiap warga negara untuk beribadat menurut agamanya; memperteguh toleransi ke-agamaan, sebagai praktek ber-Tuhan secara berkebudayaan dengan tanpa “Egoisme Agama; pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional, yang diarahkan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab; memperkuat etos kerja yang bersumber dari nilai-nilai keagamaan; memperkuat landasan-landasan etik dan moral bagi pembangunan; dan memberikan motivasi yang bersifat teologis kepada setiap subjek pembangunan.

Indonesia, dengan kondisi keberagaman dan sebagai bangsa yang besar, sejak awal para Pendiri Bangsa Indonesia telah sepakat untuk menetapkan Negara Indonesia Merdeka sebagai Negara Ketuhanan sebagaimana terdapat dalam sila pertama Pancasila. “Di Era Globalisasi sekarang ini, Pemerintah dan masyarakat hendaknya bersama-sama bergotong royong mengisi ruang-ruang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan pemahaman keagamaan yang tidak sempit, atau menggunakan istilah Bung Karno, tanpa “egoisme agama”” imbau Menko PMK. “Saya juga mengajak jajaran pengurus NU dan PWNU di semua daerah dapat bersinergi dengan Pokja Revolusi Mental dalam mengupayakan pembentukan karakter bangsa yang merupakan kerja tanpa henti selama Republik ini ada.”

Menko PMK lalu mengutip pidato Bung Karno ketika menjelaskan tentang sila Ketuhanan dalam Pidato 1 Juni di depan sidang BPUPKI yang pada intinya menegaskan pada prinsipnya bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan, Tuhan-nya sendiri; pada prinsipnya, hendaknya Negara Indonesia ialah Negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dan beribadah dengan cara yang leluasa; pada prinsipnya segenap rakyat hendaknya meniadakan egoisme agamanya; dan pada prinsipnya, Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, berkeadaban, dengan sikap saling hormat menghormati sesama pemeluk agama dan kepercayaan.

“Oleh karena itu, Agama dalam Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, merupakan Pembangunan Agama yang diarahkan untuk dapat memberikan kekuatan pendorong kemajuan, memberikan landasan masyarakat yang berakhlak, bermoral, dan ber-etika yang mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan ber-Bhineka Tunggal Ika, dalam mencapai kesejahteraan bersama. Agama dalam Pembangunan Manusia dan dan Kebudayaan, memberikan landasan etik dan moral dalam membangun Jiwa Gotong Royong untuk menjadikan Indonesia berdaulat, berdikari, dan berkepribadian,” tandas Menko PMK. “Siapa pun dan apapun agamanya, kalau untuk kepentingan bangsa dan negara kita harus bersatu!” Demikian Menko PMK lagi dalam penutup arahnya.

Bagian Humas dan Perpustakaan

Biro Hukum, Informasi dan Persidangan
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
roinfohumas@kemenkopmk.go.id
www.kemenkopmk.go.id
Twitter: @KemenkoPMK